ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) tentang pelaksanaan *Class Action* dalam Peradilan di Indonesia dalam Kajian *Siyāsah Syar'iyyah*. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan *Class Action* di peradilan Indonesia dan kajian *Siyāsah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan *Class Action*.

Data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa buku, artikel, jurnal, dan karya tulis lain yang menunjang penelitian ini. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah dengan mengklasifikasikan data, kemudian dianalisis secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa *class action* pada intinya adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class repesentatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Prosedur dalam *class action* dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan: permohonan pengajuan gugatan secara *class action;* proses sertifikasi; pemberitahuan; pemeriksaan dan pembuktian dalam *class action;* pelaksanaan putusan. Adapun *class action* di Indonesia diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok.

Class action menurut *siyāsah syar'iyyah* secara normatif telah terjadi dalam sejarah hukum Islam. Hal itu bersumber dari Zaid bin Tsabit yang digugat *class action* oleh sahabat Anshor dan diselesaikan oleh Rasul dengan putusan hukum secara seimbang. Secara *siyāsah syar'iyyah* pelaksanaan *class action* pada peradilan di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan bahkan membantu dalam menyelesaikan aneka ragam problem masyarakat.

Saran yang dapat kami berikan kepada lembaga peradilan agar supaya mewadahi seluruh permasalahan *class action* dan dapat menyelesaikan dengan baik, untuk pemerintah diharapkan dapat membuat undang-undang mengenai prosedur *class action* ini agar ada payung hukum bagi masyarakat yang terkena permasalahan tersebut, bukan hanya sekedar PERMA, karena dalam sitem hukum Indonesia itu tidak mengenal dan tidak termasuk kedalam sistem hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id